

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA

Edwin Nurdiansyah

Dosen Pendidikan PKn FKIP Universitas Sriwijaya

e-mail: edwin.nurdiansyah12@gmail.com

Abstract: *The process of reforms bring change in various aspects of the life of a citizen of Indonesia, Indonesia became a democracy characterized by the presence of the presidential elections and head of the area directly by the people. The consequence of this is that citizens should understand the demands on Indonesia politics, one that can be done is through political education. But in fact now, citizens of Indonesia have yet to gain maximum political education, their political knowledge is still very less so that only made certain by the political commodity. This shows the Government and the political parties are responsible in carrying out its role of political education is still insufficient. Political education which did not go well will have an impact on the implementation of democracy is not even potentially effective sectoral cause conflict.*

Keywords: *Democracy, Political Education*

Abstrak: Proses reformasi membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan warga negara Indonesia, Indonesia menjadi negara demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Konsekuensi dari hal tersebut ialah warga negara Indonesia dituntut harus paham terhadap politik, salah satu yang dapat dilakukan ialah melalui pendidikan politik. Namun kenyataannya sekarang, warga negara Indonesia belum mendapatkan pendidikan politik secara maksimal, pengetahuan politik mereka masih sangat kurang sehingga hanya dijadikan komoditi politik oleh golongan tertentu. Hal ini menunjukkan pemerintah dan partai politik yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan politik perannya masih kurang maksimal. Pendidikan politik yang tidak berjalan dengan baik akan berdampak pada pelaksanaan demokrasi yang tidak efektif bahkan berpotensi menimbulkan konflik sektoral.

Kata Kunci: Demokrasi, Pendidikan Politik

PENDAHULUAN

Masa reformasi menjadi tonggak pembenahan kembali semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, reformasi mulai memberikan penyadaran kepada setiap insan untuk memulai menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan untuk mencapai cita-cita nasional. Indonesia setelah memasuki masa reformasi menjadi negara yang demokratis ditandai salah satunya dengan adanya proses pemilihan kepala daerah secara

langsung oleh rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut maka segenap warga negara Indonesia diwajibkan untuk dapat mengerti tentang politik agar dapat berperan aktif dalam dunia politik tidak hanya sekedar objek politik sesaat demi mencapai suatu ambisi dari golongan tertentu.

Dalam rangka mendukung terwujudnya pelaksanaan sistem negara yang demokratis demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan lembaga yang disebut partai politik (parpol) yang merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam

mengembangkan kehidupan demokrasi. Fungsi parpol sebagaimana disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik antara lain adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meningkatnya jumlah parpol di Indonesia idealnya membawa konsekuensi bahwa masyarakat mempunyai wawasan yang lebih luas tentang hal yang terkait dengan kebebasan berdemokrasi. Namun demikian, sampai saat ini peran parpol tersebut dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat masih belum bisa dirasakan secara maksimal.

Kurangnya sosialisasi maupun pendidikan politik pada masyarakat mengakibatkan masyarakat pemilih maupun masyarakat pendukung tidak dewasa dalam mengikuti dan menyikapi proses demokrasi. Jika hal tersebut dibiarkan maka akan berdampak menimbulkan konflik masif yang mengakibatkan stabilitas keamanan akan terganggu dan kemungkinan berpotensi untuk menuju ke arah disintegrasi bangsa, sehingga demokrasi yang diharapkan akan membuat kemajuan bagi bangsa Indonesia malah menghancurkan bangsa Indonesia itu sendiri.

PEMBAHASAN

Sherman dan Kolker dalam (Affandi, 2012: 31) mengemukakan bahwa:

“Pendidikan politik selalu terkait dengan internalisasi nilai, suatu proses dimana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dalam konsep dirinya. Sebagai proses pembudayaan, pendidikan politik terkait dengan nilai, kepercayaan, dan pola perilaku yang dipelajari pada usia awal

yang membentuk sifat dasar seseorang”.

Dalam beberapa hal, pandangan di atas sejalan dengan pendapat Plano dalam (Affandi, 2012:31) yang menyebutkan bahwa “Sosialisasi politik sebagai proses belajar. Melalui proses ini, individu diharapkan memperoleh orientasi, baik berupa keyakinan, perasaan maupun komponen nilai tentang pemerintah dan kehidupan politik.” Pendidikan politik memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi kelangsungan hidup serta regenerasi suatu organisasi politik dan juga bagi kehidupan politik di suatu negara. Melalui kegiatan pendidikan politik anggota suatu organisasi politik, termasuk juga masyarakat yang tidak bergabung langsung dengan partai politik mendapatkan transfer nilai dan warisan nilai-nilai dari generasi sebelumnya yang sudah terlebih dahulu berkecimpung dalam urusan politik.

Kantraprawira dalam (Affandi, 2012: 33) memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Dalam perspektif ini, pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasi dalam menyalurkan tuntutan dan dukungannya.

Pengetahuan politik akan membawa seseorang pada tingkat partisipasi tertentu, pengetahuan politik yang mumpuni akan membuat seseorang dapat lebih aktif dalam bidang politik begitu pun sebaliknya. Dalam sistem politik tidak cukup hanya berdimensi pengetahuan, tetapi lebih merupakan paduan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dikembangkan bersama-sama. Ketiga hal tersebutlah yang dianggap sebagai nyawa dari melek politik warga negara.

Affandi (2012:33-34) menguraikan indikasi melek politik dilihat dari tiga aspek yang merupakan hasil dari pendidikan politik.

Dari aspek pengetahuan, seseorang dikatakan melek politik apabila sekurang-kurangnya menguasai tentang: 1. Informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan, dari mana uang berasal, bagaimana sebuah institusi bekerja, 2. Bagaimana melibatkan diri secara aktif dalam memanfaatkan pengetahuan, 3. Kemampuan memprediksi secara efektif bagaimana cara memutuskan sebuah isu, 4. Kemampuan mengenal tujuan kebijakan secara baik yang dapat dicapai ketika isu (masalah) telah terpecahkan, 5. Kemampuan memahami pandangan orang lain dan membenarkan mereka tentang tindakan dirinya sendiri.

Aspek yang membentuk melek politik paling tidak berkenaan dengan sikap tentang kebebasan, toleransi, fair, menghargai kebenaran, menghargai pemikiran, dan aspek lain, yang biasa disebut nilai prosedural. Sedangkan dari aspek keterampilan seseorang dikatakan melek politik jika ia tidak hanya berperan sebagai penonton yang baik, tetapi mereka mampu berpartisipasi aktif atau bahkan menolak secara positif. Seseorang yang melek politik pun memiliki toleransi terhadap pandangan orang lain dan dapat memikirkan perubahan dan bagaimana metode yang tepat untuk menguasainya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pendidikan politik memiliki arti penting dalam pembentukan pengetahuan, sikap, hingga *skill* yang berujung pada partisipasi warga negara.

Hal senada juga diuraikan dalam UURI No. 2 tahun 2008 pasal 31, bahwa yang menjadi tujuan pendidikan politik, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, secara lebih luas pendidikan politik diharapkan dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Pendidikan politik sebagai pembentukan karakter bangsa.

Dengan kata pendidikan mengandung suatu tuntunan manusiawi. Suatu tindakan yang bermaksud untuk mengubah pikiran, sikap dan perilaku manusia ke arah yang menunjukkan kedewasaan. Soemantri dalam Hermawan (2011: 71) menjelaskan bahwa pendidikan politik yang mengarahkan pada pembentukan karakter bangsa merupakan tahap awal bagi suatu bangsa yang memperoleh kemerdekaan. Pendidikan politik dalam pembentukan karakter bangsa juga ditegaskan dalam UU RI No 2 tahun 2008 bahwa salah satu tujuan partai politik adalah meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Pendidikan politik sebagai pembangunan kesadaran berpolitik.

Hal ini juga disebutkan dalam UU No.2 Tahun 2008 bahwa tujuan parpol adalah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun kesadaran berpolitik dimaksudkan adalah proses penyadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya.

3. Pendidikan politik sebagai pembinaan kader parpol.

Dalam upaya melahirkan kader parpol yang handal dan berkualitas memang diperlukan sistem pengkaderan yang efektif dan produktif. Pendidikan politik

sangat strategis dalam kerangka pembinaan tersebut. Firmanzah dalam (Hermawan, 2011: 72) menyoroti tentang peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan dalam dua hal, pertama peran dan tugas internal organisasi dan kedua parpol juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi.

4. Pendidikan politik sebagai penanaman ideologi kebangsaan.

Setiap parpol memiliki ideologi yang dianutnya. Baik itu ideologi keagamaan, kebangsaan, kekaryaan, dan komunisme. Ideologi yang dianut oleh parpol sangat penting karena menggambarkan visi, misi, dan tujuan parpol yang ingin dicapai. Ideologi dalam kaitan politik atau dikenal dengan ideologi politik adalah suatu perumusan keyakinan atau program yang dimiliki oleh suatu negara, suatu bangsa, partai politik atau perkumpulan politik lain yang bermaksud mencapai tujuan politik yang khusus.

Kemudian, kebijakan lain yang berkaitan dengan pendidikan politik juga terdapat pada Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Pada Permendagri ini dijelaskan Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan, antara lain:

- a. seminar dan lokakarya;
- b. sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
- c. asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis;
- d. pagelaran seni dan budaya;
- e. jambore, perkemahan, napak tilas; dan
- f. berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.

Pada saat partai politik tidak melakukan pendidikan politik (sosialisasi dan rekrutmen politik) secara efektif dan benar, warga negara

melek politik akan sangat sulit untuk diwujudkan, dan tentu saja secara alamiah apatisme politik pasti semakin tinggi hal tersebut salah satu indikatornya ialah tingginya warga negara yang tidak memakai hak nya untuk memilih (golput) baik dalam pemilu ataupun pemilukada. Warga negara memiliki anggapan jika tidak ada manfaatnya bagi mereka dalam menyalurkan hak pilihnya. Keadaan tersebut tentu saja berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa karena bukan saja dapat membuat praktik demokrasi menjadi tidak berjalan tetapi juga dapat dijadikan oleh kelompok ataupun golongan tertentu untuk pelanggaran kekuasaan dan membuat praktik korupsi makin merajalela.

KESIMPULAN

Pendidikan politik selalu terkait dengan internalisasi nilai, suatu proses dimana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dalam konsep dirinya. Fungsi pemerintah dan partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi warga negara harus dilaksanakan secara maksimal karena pendidikan politik yang baik akan semakin menguatkan proses demokrasi. Warga negara yang paham akan hak dan kewajibannya dalam politik akan mendukung terwujudnya negara yang demokratis. Namun sebaliknya, warga negara yang tidak paham politik dikarenakan tidak mendapatkan pendidikan politik akan berpotensi menjadi bibit konflik dan mengancam keutuhan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, I. (2012). *Pendidikan Politik*. Bandung: Mutiara Press.
- Hermawan, C, I. (2011). *Peranan Partai Politik dalam Pendidikan Politik Bangsa*. K@ta: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 36(19), pp.66-75.

Kantaprawira, R. (2006).*Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 tahun 2010 tentang *Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik*.

Undang-undang RI No. 2 tahun 2008 tentang *Partai Politik*.

Undang-undang RI No. 2 tahun 2011 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*.